

Pengaruh Ulama, Pendidikan dan Modal Sosial dalam PEMBERDAYAAN Masyarakat

Zilfaroni

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: zilfa83@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the role and position of ulama in the realm of education and their contribution to the formation of social capital in society. The position of ulama is not only associated with religious functions but also other functions, so that, ulama is who play an active role outside the fields of education and da'wah, such as in the fields of politics and economics. Ulama not only act as religious leaders but also as agents of social change with a strong influence in shaping character, values, and norms through formal and non-formal educational institutions. Qualitative approach was used in this study, with data collection techniques including observation, interviews, and literature review. The results indicate that ulama hold a strategic position in transmitting Islamic and social values, building collective trust, and strengthening social networks that serve as the foundation of social capital. The role of ulama in education has also been proven to strengthen social solidarity and community participation in religious and social activities. Thus, the position of ulama is central to the development of national character through values-based education and the strengthening of social capital.

Keywords: *Ulama, Pendidikan, Modal Sosial*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan kedudukan ulama dalam ranah pendidikan serta kontribusinya terhadap pembentukan modal sosial di masyarakat. Ulama tidak hanya berperan sebagai pemimpin keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memiliki pengaruh kuat dalam membentuk karakter, nilai, dan norma melalui lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama memiliki posisi strategis dalam mentransmisikan nilai-nilai keislaman dan sosial, membangun kepercayaan kolektif, serta memperkuat jaringan sosial yang menjadi fondasi dari modal sosial. Peran ulama dalam pendidikan juga terbukti mampu memperkuat solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat dalam

kegiatan keagamaan maupun sosial. Dengan demikian, kedudukan ulama menjadi sentral dalam pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan yang berbasis nilai dan penguatan modal sosial. *Keempat*, peranan adalah aspek dinamis daripada status. Oleh karena itu, status menentukan peranan seseorang, begitupun status ulama akan menentukan peranan ulama.

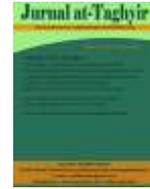
Kata Kunci: Ulama, Pendidikan, Modal Sosial

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki sejarah panjang dalam kehidupan keagamaan dan sosial yang melibatkan peran penting para ulama. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi, ulama tidak hanya dikenal sebagai penjaga ajaran agama, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat yang berperan dalam bidang pendidikan dan pembangunan sosial. Peran strategis ini menjadikan ulama sebagai figur yang dihormati dan dijadikan rujukan moral serta intelektual di tengah masyarakat.

Dunia pendidikan merupakan sarana utama dalam membentuk karakter bangsa. Melalui pendidikan, nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan ditanamkan kepada generasi muda. Dalam konteks ke Indonesiaan, pendidikan keagamaan yang dipimpin oleh para ulama di pesantren, madrasah, dan lembaga dakwah telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan berbasis keislaman ini tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan semangat kebersamaan.

Di sisi lain, konsep modal sosial yang mencakup kepercayaan, solidaritas, jaringan sosial, serta nilai dan norma bersama, sangat relevan dalam masyarakat Indonesia yang mengutamakan gotong royong dan kebersamaan. Ulama memiliki peran besar dalam membangun dan menjaga modal sosial ini melalui pendekatan dakwah, pendidikan, dan kepemimpinan moral. Kepercayaan masyarakat



kepada ulama menjadi kekuatan yang mampu menggerakkan partisipasi sosial, menjaga harmoni, serta mendorong perubahan positif di tengah tantangan sosial, ekonomi, dan budaya.

Di era modern ini, tantangan kehidupan masyarakat Indonesia semakin kompleks, mulai dari dekadensi moral, polarisasi sosial, hingga lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam konteks inilah, peran ulama sebagai pendidik dan penguat modal sosial menjadi sangat penting dan mendesak untuk terus dikaji dan diperkuat. Melalui pendekatan pendidikan yang humanis dan berbasis nilai, serta peran aktif dalam kehidupan sosial, ulama dapat menjadi agen transformasi sosial yang signifikan bagi kemajuan bangsa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis, seperti buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴ Peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal, hasil penelitian, serta referensi lain yang relevan dengan fokus dakwah kultural.

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menerapkan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan gambaran yang jelas, sistematis, objektif, serta kritis mengenai dakwah kultural. Pendekatan ini dimulai dengan langkah pertama, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian dilanjutkan dengan proses klasifikasi dan deskripsi guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dakwah kultural.

C. Hasil dan Pembahasan

Sebelum mendiskusikan tentang modal sosial (*social capital*), terlebih dahulu harus dipahami apa yang dimaksud dengan modal atau kapital itu sendiri.

Secara etimologis, sebagaimana dikutip oleh Damsar bahwa modal atau kapital berasal dari bahasa Latin "caput" yang berarti "kepala",¹. Dalam New Webster's Dictionary, modal (bahasa Inggris: *capital*) berarti ". . . the stock of goods or commodities, . . . interest in the assets of a business, . . . profit from the sale of assets."² Sedangkan dalam Kamus Ekonomi, Winardi (1980: 54) mendefinisikan modal atau kapital adalah benda-benda berupa alat-alat produksi, uang untuk investasi atau yang diinvestasikan, pendapatan yang akan diterima dari investasi, dan nilai berupa uang aktiva total.³ Arti lain dari pada modal atau kapital adalah barang, tenaga fisik, keterampilan atau gabungan antara tenaga fisik dan ketrampilan. Dengan demikian, modal atau kapital berarti dana, uang, bunga, tumpukan barang, bunga dari aset usaha, penjualan, alat-alat produksi, bunga dari pada usaha, keuntungan dari hasil penjualan berbagai aset.

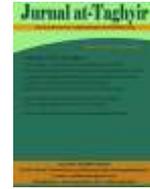
Secara terminologis, modal atau kapital adalah "suatu bentuk nilai surplus dan investasi yang diharapkan pengembaliannya dalam berbagai bentuk⁴. Modal atau kapital tersebut bisa berbentuk pendapatan, keuntungan, laba dalam arti yang luas. Bahkan dalam perkembangan

¹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 173 tahun 2011).

² *New Webster's Dictionary and Thesaurus of The English Language*, (New York: Lexicon Publications, Inc., h. 146 tahun 1991).

³ Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia)*, (Bandung: Penerbit Alumni, h. 54 tahun 1980).

⁴ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 176 tahun 2011).



terakhir, pengertian modal atau kapital bisa mengandung berbagai bentuk, di antaranya *human capital*, *cultural capital*, *symbolic capital*, dan *social capital*

Pengertian Modal Sosial

Dikaitkan dengan pengertian modal atau kapital di atas, maka modal atau kapital sosial (*social capital*) bisa dimaknai sebagai investasi yang ditanamkan dalam sebuah atau banyak lembaga (terutama lembaga sosial, ekonomi, dan budaya) dan bisa digunakan untuk mendatangkan keuntungan atau surplus dalam bentuk lain (misalnya uang, barang, atau jasa). Pengertian keuntungan disini sangat beraroma kebarat-baratan yang materialistis, karena dipengaruhi oleh *Capitalism*, yaitu suatu sistem ekonomi di mana alat-alat produksi, pendistribusian, dan pertukaran dimiliki secara pribadi dan dijalankan juga untuk kepentingan pribadi. Kehidupan manusia meliputi aspek spiritual (jiwa) dan fisik (tubuh). Oleh karena itu, penggunaan kata “menguntungkan” tampaknya kurang relevan untuk mendefinisikan kapital atau modal sosial. Penulis lebih cenderung menggunakan kata “bermanfaat” atau “mendatangkan manfaat”. maka kapital sosial atau modal sosial bisa diartikan sebagai *investasi atau kelebihan-kelebihan yang diperoleh akibat interaksi sosial yang kemudian bisa mendatangkan manfaat atau dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat tersebut.*

Simpulan ini tampaknya sejalan dengan pendapat Putman sebagaimana dikutip oleh Haryanto bahwa modal sosial adalah seperangkat hubungan antarmanusia yang bersifat horizontal yang mencakup jaringan dan norma bersama yang berpengaruh terhadap

produktivitas masyarakat.⁵ Dengan demikian, modal sosial terwujud dalam hubungan sosial yang memungkinkan timbulnya berbagai kesempatan dan banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh pemilik modal atau kapital dalam melakukan berbagai tindakan karena adanya jaringan dan norma yang berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat, meskipun juga bisa mengakibatkan berbagai hambatan struktural.

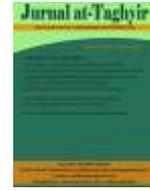
Beberapa Sumber Modal Sosial

Sebagaimana dikatakan oleh Nan Lin (2001: 3), bahwa "modal" atau "kapital" merupakan sumber-sumber (*resources*). Ketika sumber-sumber tersebut diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan (*profit*) sebagai tujuan dari investasi itu sendiri, modal tersebut kemudian diproses dua kali. *Pertama* sebagai investasi, yang merupakan *outcome* dari proses produksi itu sendiri. *Kedua* sebagai keuntungan setelah dipasarkan, yang merupakan faktor penyebab (*causal factor*) dalam sebuah produksi, yaitu modal tersebut ditukar untuk menghasilkan keuntungan.

Ada tiga level bentuk kapital sosial yang utama, yaitu nilai, institusi dan mekanisme. Nilai terdiri dari simpati, rasa berkewajiban, rasa percaya, reciprositas, dan pengakuan timbal balik. Institusi mencakup keterlibatan umum sebagai warga negara, asosiasi dan jaringan sedangkan mekanisme meliputi kerja sama dan sinergi antar kelompok.

Namun demikian, modal yang berupa *resources* itu sendiri juga memiliki sumber-sumber di luar dirinya, baik yang berbentuk material maupun immaterial. Karena itu, agama/kepercayaan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan jasa dapat dikategorikan sebagai sumber-sumber immaterial; sedangkan etnis, penduduk, bangsa, negara, lembaga pendidikan, perumahan, keluarga, pranata sosial, institusi dan organisasi sosial, dan lainnya yang sejenis adalah sumber-sumber

⁵ Haryanto, Sindung, *Sosiologi Agama, Dari Klasik Hingga Post Modern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, h. 207 tahun 2015).



modal material.

Begitu pun sumber-sumber modal sosial dapat digali dan berasal dari masyarakat itu sendiri. Keanekaragaman budaya, etnis, agama dan bahasa bisa menjadi sumber daripada modal sosial. Masyarakat multikultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, misalnya, merupakan investasi (kelebihan atau keunggulan) yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain yang bersifat homogen. Heterogenitas atau multikultural dari masyarakat Indonesia merupakan kelebihan atau keunggulan dibanding dengan negara-negara lain yang bangsanya bersifat homogen. Oleh karena itu, heterogenitas atau multikultural bangsa Indonesia adalah sumber dari modal sosial bangsa Indonesia dan sekaligus juga sebagai modal atau kapital dari bangsa dan negara Indonesia.

Bentuk-Bentuk Modal Sosial

Modal sosial bisa berbentuk lembaga atau institusi, pranata, organisasi, sekolah, rumah sakit, koperasi, dan pasar, di mana terjadi interaksi sosial di dalamnya. Dalam lembaga pendidikan seperti sekolah atau madrasah, guru berinteraksi dengan siswa-siswanya, para siswa saling berinteraksi secara individual atau berkelompok, pimpinan lembaga pendidikan berinteraksi dengan staf atau bawahannya, baik dengan karyawan administrasi maupun dengan para guru atau pengajar. Di rumah sakit juga terjadi interaksi sesama dokter, dokter dengan perawat, dokter dengan pasien, dengan pengunjung, dan dengan warga rumah sakit lainnya. Interaksi juga terjadi di lingkungan lembaga koperasi seperti antara pengurus atau pegawainya dengan para nasabah. Begitu juga di lembaga ekonomi yang disebut pasar, setiap saat terjadi interaksi antara pedagang dengan pembeli, atau antar sesama pedagang atau sesama pembeli di pasar.

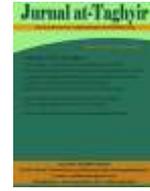
Begitu juga organisasi atau perkumpulan, seperti NU dan

Muhammadiyah, juga mempunyai andil atau kontribusi bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara di negeri ini. Kedua organisasi sosial keagamaan ini telah berupaya mengorganisir para anggotanya untuk membangun bangsa ini. Ini merupakan investasi yang cukup besar dari kedua organisasi ini dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, meski kemudian imbalan yang mereka dapatkan tidak selalu mengutungkan, baik dari masyarakat maupun pemerintah, bagi kelangsungan hidup ke dua organisasi ini. Karena itu, organisasi atau perkumpulan juga dapat dikatakan sebagai modal sosial khususnya untuk membangun kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang lebih baik ke depannya.

Lembaga Pendidikan Sebagai Modal Sosial

1. Sekolah atau Perguruan Tinggi

Dalam lembaga pendidikan, guru berinteraksi dengan siswa-siswanya, para siswa saling berinteraksi secara individual atau berkelompok, pimpinan lembaga berinteraksi dengan staf atau bawahannya, baik dengan karyawan administrasi maupun dengan para guru atau pengajar. Bagaimanapun, guru dan staf administrasi di sekolah, dokter dan perawat di rumah sakit, pegawai koperasi, telah mengabdikan dirinya untuk kelangsungan hidup lembaga (pendidikan), rumah sakit, dan koperasi. Tenaga, pemikiran dan ketrampilan yang dikeluarkan oleh guru dan staf administrasi, dokter dan perawat, pegawai koperasi, tidak sebanding dengan gaji atau upah yang mereka peroleh. Tenaga, pemikiran dan ketrampilan yang telah mereka keluarkan selama bekerja merupakan investasi bagi kelangsungan hidup lembaga. Setelah mereka pensiun atau bila mereka berhenti bekerja di lembaga tersebut, mereka tidak lagi mendapatkan keuntungan kecuali uang pesangon dari lembaga dimana mereka bekerja sebelumnya. Padahal lembaga-lembaga tersebut, tetap eksis.



2. Masyarakat

Pengertian masyarakat salah satunya dikemukakan oleh Koentjaraningrat dalam bukunya “Pengantar Antropologi”. Beliau mengatakan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup dari makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.⁶ Ini artinya bahwa masyarakat adalah sekumpulan individu atau sekelompok orang yang tinggal dalam suatu tempat tertentu dan hidup dengan kebudayaan mereka secara turun temurun. Masyarakat tentu berbeda dengan keluarga yang jumlah anggotanya terbatas (baik keluarga inti maupun keluarga luas), dan dengan kelompok atau kumpulan orang lainnya seperti crowd, marga, organisasi dan kelompok-kelompok kecil dan terbatas lainnya.

Dalam kajian sosiologis dan antropologis, sekelompok individu yang disebut masyarakat bisa dibedakan dalam dua bentuk, yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Durkheim, dalam buku utamanya yang bertajuk “The Division of Labour in Society”, menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk dasar daripada masyarakat, yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Dia juga mengatakan bahwa masyarakat tradisional mempunyai bentuk yang berbeda kohesi sosial di antara anggota-anggotanya. Jenis hubungan seperti ini dia sebut “*mechanical solidarity*”. Selain daripada itu, orang-orang dalam masyarakat tradisional seperti ini memperlihatkan tugas-tugas mereka yang terbatas sebagai sebuah komunitas agraris sederhana berdasarkan kelompok-kelompok keluarga atau marga dalam daerah pemukiman di desa. Secara umum, mereka sama-sama mengikuti sebuah pola yang kaku daripada norma-norma dan kepercayaan-

⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: P.D. Aksara, h. 98 tahun 1969).

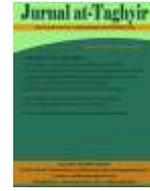
kepercayaan tradisional. Akan tetapi, kesamaan mereka tidak berarti bahwa mereka tergantung satu sama lain, melainkan setiap individu atau kelompok adalah secara relatif mengontrol dirinya atau kelompok mereka sendiri (*relatively self-contained*), dan mempunyai pembagian kerja yang terbatas sesuai dengan kemampuan dirinya atau kelompoknya.

Sebaliknya, masyarakat modern bersaing lebih banyak untuk memperoleh sumber-sumber penghasilan yang relatif terbatas. Ketika persaingan mengarah kepada suatu permasalahan, pemecahan sosialnya muncul. Dalam hal tertentu, masyarakat modern harus beradaptasi dengan lingkungan alam sekitar dan juga lingkungan sosial mereka. Dengan demikian, pembahagian kerja menjadi lebih rumit dan menimbulkan saling ketergantungan yang terus berkembang di antara anggota-anggota masyarakat. Kemudian, mereka juga membentuk lembaga- lembaga khusus yang juga berbeda untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan primer dan sekunder mereka yang khusus pula daripada masyarakat, seperti keperluan akan agama, ekonomi, politik dan pendidikan. Sebagai masyarakat yang lebih kompleks, kohesi yang dimiliki oleh masyarakat modern, yang disebut '*organic solidarity*', adalah saling ketergantungan satu sama lain.

Dengan demikian, masyarakat tradisional dan masyarakat modern dapat dibedakan dengan melihat pola kehidupan dan pekerjaan, ikatan individu dan peranan kekerabatan, bentuk perhubungan, pola fikir dan pandangan atau orientasi masa. Perbedaan tersebut bisa juga dilihat berdasarkan dinamika budaya atau pola budaya, struktur sosial, kelembagaan sosial, dan sikap mereka terhadap perubahan sosial.⁷

Masyarakat tradisional, menurut Durkheim, memiliki ikatan

⁷ Macdonis, John L., *Sociology*, Tenth Edition, (New Jersey: Pearson Prentice-Hall, h. 215 tahun 2005).



sosial berbentuk “mechanical *solidarity*”, masyarakat modern memiliki ikatan sosial berbentuk “*organic solidarity*”. Tonnies menyebut kelompok pertama sebagai masyarakat “Gemein- schaft”, kedua sebagai masyarakat “Gesellschaft”.⁸

Selain daripada itu, menurut Webster, tiga ciri penting terdapat dalam masyarakat tradisional atau primitif, yaitu:

1. Nilai tradisionalisme adalah dominan, yaitu masyarakat berorientasi ke masa lampau dan mereka tidak cukup memiliki kemampuan budaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru.
2. Sistem kekerabatan adalah perkara yang menentukan untuk semua praktik sosial, dan menjadi alat utama yang dengannya hubungan-hubungan ekonomi, politik dan hukum menjadi terkontrol. Posisi seseorang dalam sistem kekerabatan didasarkan kepada keturunan, yaitu sebuah refleksi daripada status atau kedudukan keluarga, marga atau sukubangsa yang daripadanya seseorang dilahirkan. Posisi seseorang hanya akan berubah bila dia menaiki hirarki keluarga, dan status miliknya diperoleh melalui hubungan kekerabatan.
3. Para anggota daripada masyarakat tradisional memiliki kedekatan emosional, percaya tahyul dan fatalistik terhadap dunia: ‘*what will be be*’, ‘*things have always been this way*’.

Sebaliknya, masyarakat modern dibentuk oleh ciri-ciri yang sebenarnya berlawanan, yaitu:

1. Masyarakat mungkin masih memiliki berbagai tradisi, tetapi tidak

⁸ Marshall, Gordon, “Talcott Parsons”, dalam *A Dictionary of Sociology*, (Oxford: Oxford University Press, h 27 tahun 1998).

memperbudak mereka. Mereka menentang sesuatu yang tidak begitu perlu dan melibatkan diri ke dalam ke- majuan budaya yang berkelanjutan. Dengan demikian, mereka tidak terjatuh dalam tradisionalisme.

2. Keekerabatan memiliki peranan yang kurang penting dalam semua aspek kehidupan masyarakat modern. Bahkan dalam sebuah pekerjaan yang berat dan menuntut keberhasilan serta motivasi yang tinggi, semuanya tidak ditentukan oleh keekerabatan.
3. Anggota-anggota masyarakat modern tidak fatalistik, tetapi berpandangan ke depan dan inovatif, siap mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan, terutama dalam perkara bisnis, dalam merefleksikan semangat kewirausahaan yang kuat dan pendekatan ilmiah yang rasional terhadap tantangan zaman dan global.⁹

Bagaimanapun, telah terjadi peralihan daripada masyarakat tradisional kepada masyarakat modern melalui proses difusi budaya dari berbagai belahan dunia yang lebih maju, masyarakat tradisional mengalami peralihan menuju modern. Dapat dipahami bahwa peralihan tersebut adalah sebuah '*empathetic*' society, yaitu masyarakat yang dimaknai dengan 'ia ingin menjadi apa' (*what it wants to become*). Untuk menyelami dan memahami perasaan orang lain (*to be empathetic*). Dengan demikian, semakin banyak sebuah masyarakat memperlihatkan empati, semakin banyak pula mereka terlibat dalam proses modernisasi, dan juga semakin cenderung mereka menjadi modern.

Dalam perspektif pendidikan, masyarakat bisa berperan sebagai subjek, objek, dan mitra pendidikan. Sebagai subjek, ma- syarakat menjadi

⁹ Webster, *Andraw, Introduction to the Sociology of Development*, (London: Macmillan Publishers Ltd., h. 50-51 tahun 1984).

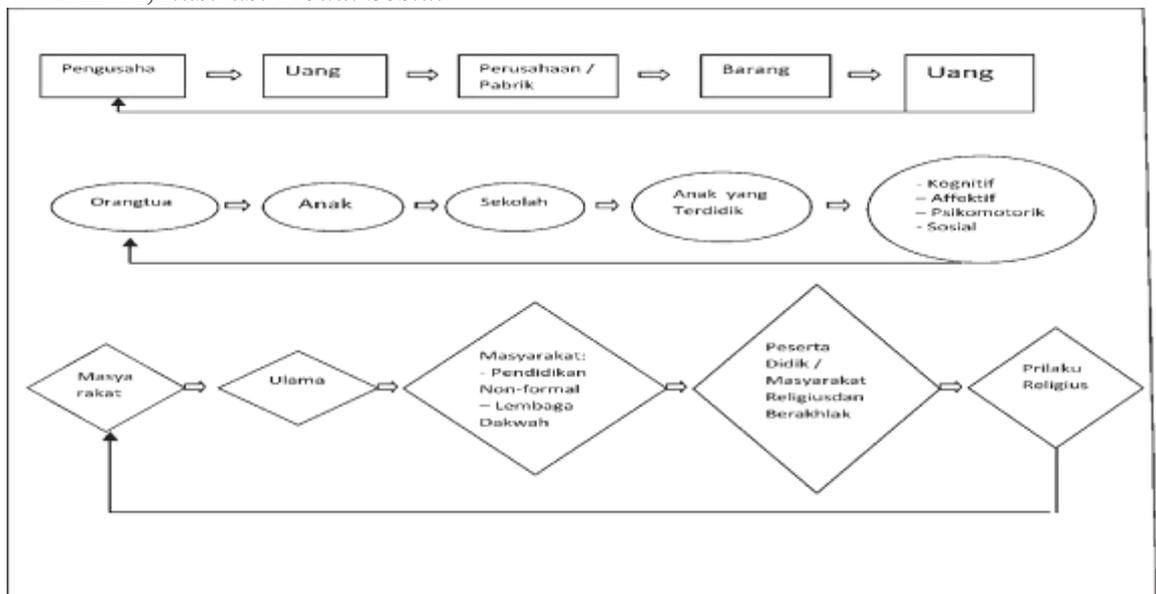


pelaksana pendidikan, baik melalui yayasan atau organisasi. Sebagai objek, masyarakat adalah input pendidikan. Sebagai mitra, masyarakat bersama pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan buat anak-anak mereka. Bahkan masyarakat merupakan wadah proses pendidikan itu sendiri, sebagai sarana pendidikan non formal. Oleh karena itu, masyarakat adalah modal sosial untuk dunia pendidikan.

Ulama Sebagai Modal Sosial

Tidak dapat dinafikan bahwa ulama saat ini dominan berkecimpung pada dunia pendidikan formal dan non formal. Keberadaan mereka adalah sugesti utama untuk para penuntut ilmu. Status dan keberadaan mereka menjadi publik figur mulai dari keluarga, lembaga dan dunia sosial sekaligus motivator dalam kehidupan muamalah. Berikut ilustrasi fungsi dan keberadaan ulama sebagai tokoh sosial .

Gambar; *Ilustrasi Modal Sosial*



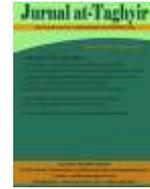
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa ulama juga merupakan modal atau kapital sosial yang dimiliki oleh masyarakat

sebagaimana uang dan anak yang masing-masing dimiliki oleh pengusaha dan orangtua. Modal sosial tersebut kemudian diinvestasikan atau diproses melalui lembaga yang berbeda-beda. Uang diinvestasikan ke perusahaan atau pabrik (lembaga ekonomi), anak diinvestasikan ke sekolah (lembaga pendidikan), dan ulama dalam masyarakat melalui lembaga pendidikan non formal dan dakwah. Produk dari berbagai modal sosial tersebut adalah berbentuk barang dengan nilai tukar berupa uang, anak yang terdidik (cerdas intelektual dan emosional) dengan nilai guna berupa pengetahuan dan keterampilan, masyarakat yang religius dan berakhlak dengan nilai guna perilaku religius. Baik uang, pengetahuan dan keterampilan, dan perilaku religius berikutnya kembali ke pemilik modal masing-masing. Keuntungan berupa uang bisa dinikmati kembali oleh pengusaha sebagai pemilik modal, keuntungan berupa pengetahuan dan keterampilan dapat dinikmati kembali oleh orangtua sebagai pemilik modal, dan keuntungan berupa perilaku religius juga dapat dinikmati kembali oleh masyarakat sebagai pemilik modal.

D. Kesimpulan

Ulama adalah seseorang atau kelompok yang memiliki ke-luasan dan ketinggian ilmu, khususnya ilmu agama, kebaikan dan keterpujian akhlaknya, dan pengakuan atau legitimasi dari masyarakat di mana dia atau mereka tinggal. Sebagai pewaris nabi keilmuan dan jejak langkahnya, bukan kenabiannya seorang ulama mesti menauladani sifat-sifat Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, baik dalam berbuat, berkata-kata, maupun berperilaku. Oleh karena itu, peranan utama dari pada ulama adalah mendidik dan berdakwah, meskipun ada banyak peranan (*a set of roles*) yang bisa ulama mainkan sebagaimana terlihat dalam lintasan sejarah di Indonesia pada umumnya dan di Kalimantan Selatan pada khususnya.

Selain daripada itu, ulama adalah juga modal sosial. Dikatakan



modal sosial karena ulama memiliki nilai surplus yang diperoleh oleh masyarakat sebagai pemilik modal atau kapital setelah diinvestasikan misalnya dalam lembaga pendidikan Islam formal, baik (pondok) pesantren atau madrasah (diniyah), dan non-formal di masyarakat dalam bentuk majlis ta'lim dan atau pengajian agama. Sebagai produk dari dua bentuk lembaga pendidikan Islam tersebut, ulama kemudian menghasilkan peserta didik atau pengikut majlis ta'lim yang religius dan berperilaku terpuji.

Dalam realitas, peranan ulama dalam pembangunan sosial bisa dilihat dari respons atau kesannya atau kesan mereka yang positif terhadap pembangunan sosial. Di samping itu, bisa digambarkan dan dijelaskan berdasarkan partisipasinya mereka dalam pembangunan sosial, khususnya di ranah intelektual dan spiritual seperti keterlibatan mereka dalam kegiatan pendidikan dan dakwah, pembimbingan, pemotivasian dan penasehatan dalam bidang sosial dan keagamaan, dan dalam aspek fisik pada umumnya (seperti pembangunan tempat ibadah dan gedung sekolah/madrasah). Peranan ulama lainnya yang berkaitan dengan pembangunan sosial adalah kepeloporan serta gagasannya atau gagasan mereka dalam pembangunan sosial, seperti merintis pembangunan lembaga pendidikan Islam dan kepemimpinan dalam upacara keagamaan serta siklus kehidupan, sehingga ulama atau kaum ulama dapat dikatakan sebagai pelaku pembangunan sosial atau "*agents of social development*".

Daftar Pustaka

Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, tahun 2011

New Webster's Dictionary and Thesaurus of The English Language, (New York: Lexicon Publications, Inc., tahun 1991

Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia)*, (Bandung: Penerbit 1980

Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

Haryanto, Sindung, *Sosiologi Agama, Dari Klasik Hingga Post Modern*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015

Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Djakarta: P.D. Aksara 1969

Macionis, John L., *Sociology*, Tenth Edition, (New Jersey: Pearson Prentice-Hall, 2005

Marshall, Gordon, "Talcott Persons", dalam *A Dictionary of Sociology*, Oxford: Oxford University Press, 1998

Webster, *Andraw, Introduction to the Sociology of Development*, London: Macmillan Publishers Ltd, 1984